

## Kelahiran Pancasila sebagai Inspirasi bagi Kaum Muda dalam Menghayati Kemerdekaan

**Roberto Sitepu \***

Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, Indonesia.

**Email** :

[roberto.sitepu@uajy.ac.id](mailto:roberto.sitepu@uajy.ac.id)

Masuk : 18 April 2025  
Revisi : 2 Mei 2025  
Diterima : 29 Mei 2025  
Diterbitkan : 27 Juni 2025

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Pembumian  
Pancasila



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Abstrak

Dasar negara Indonesia ialah Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 dan dirumuskan oleh Ir. Sukarno dalam pidatonya. Saat ini Indonesia tengah menghadapi beberapa tantangan, salah satunya ialah revisi UU TNI yang mendapatkan penolakan dari rakyat. Banyak kaum muda, di antaranya Gen Z, terlibat dalam menyampaikan aspirasinya terkait isu tersebut, tapi tidak jarang di antara mereka yang kurang menaruh perhatian terhadapnya. Kaum muda perlu belajar dari perjuangan para founding fathers di Indonesia dalam merumuskan Pancasila dalam sidang BPUPK dan mendorong agar kemerdekaan segera diproklamasikan dalam peristiwa Rengasdengklok. Dengan demikian Gen Z diharapkan semakin mampu menyadari dan mengaktualisasikan perannya dalam hidup berbangsa dan bernegara pada masa kini.

**Kata Kunci:** Pancasila, Demonstrasi Revisi Undang-Undang TNI, Generasi Z, Peristiwa Rengasdengklok

### Cara Mengutip

Sitepu, Roberto. (2025). Kelahiran Pancasila sebagai Inspirasi bagi Kaum Muda dalam Menghayati Kemerdekaan. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(1) : 1-8. <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i1.59>

## Pendahuluan

Pancasila, yang dirumuskan pada 1 Juni 1945 oleh Ir. Sukarno, merupakan dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Burhanudin dkk., 2018, hlm. 230). Sebagai ideologi yang lahir dari perjuangan kemerdekaan, Pancasila menjadi simbol persatuan dan identitas nasional yang kuat.

Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila, seperti penistaan agama, kekerasan seksual, dan gerakan separatis, menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara idealisme Pancasila dan praktik sehari-hari (Ameliy dkk., 2023, hlm. 76). Salah satu kasus yang sedang menjadi sorotan publik dewasa ini ialah proses perumusan dan pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang kurang melibatkan partisipasi publik. Ruang lingkup kasus dibatasi menjadi bagaimana membentuk karakter kaum muda Indonesia, terutama “generasi Z” yang mudah terpapar nilai-nilai dari budaya asing melalui media sosial, berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan spiritualitas perjuangan bangsa Indonesia yang sudah dihayati termasuk oleh para tokoh pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia.

Literatur mengenai Pancasila mencakup berbagai perspektif, mulai dari sejarah perumusan hingga implementasi dalam kehidupan berbangsa. Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga diakui secara internasional sebagai model ideologi yang relevan untuk masyarakat multikultural.

Saat ini, Pancasila terus dikaji dan diinternalisasi melalui berbagai jurnal ilmiah dan publikasi akademik. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) aktif mempromosikan Pancasila sebagai kekuatan akademik dan ideologi besar di dunia (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, t.t.). Beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk Gerakan Pembumian Pancasila (GPP), menjadi inisiatif masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya bersama membangun masyarakat Sosialisme Indonesia tanpa penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, serta tanpa penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa berlandaskan Pancasila (*Gerakan Pembumian Pancasila Merupakan Spirit dan Moral Kebangsaan Kita*, 2019). Internalisasi nilai-nilai Pancasila juga dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia baik secara personal maupun komunal untuk mencegah paham radikal dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

## Laporan Kasus

Fenomena yang masih hangat menjadi pembahasan dewasa ini di Indonesia ialah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Revisi Undang-Undang TNI 2025 di Indonesia mencakup beberapa perubahan penting yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 (Chaterine & Ramadhan, 2025). Revisi ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil terjadi di berbagai kota sebagai bentuk protes terhadap revisi ini.

Demonstrasi mahasiswa menentang revisi UU TNI 2025 terjadi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Manado (*Demo tolak pengesahan revisi UU TNI diwarnai teror, kekerasan, dan intimidasi terhadap aktivis, mahasiswa dan jurnalis*, 2025). Para mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil memprotes pengesahan revisi UU TNI yang memungkinkan anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil, yang mereka khawatirkan akan mengembalikan dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Aksi protes ini diwarnai dengan kekerasan dan intimidasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis oleh aparat keamanan. Demonstran juga membawa spanduk dan membakar ban sebagai bentuk protes. Amnesty International Indonesia mencatat penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi, termasuk penggunaan pentungan, gas air mata, dan meriam air. Demonstrasi ini mendapat sorotan dari media asing yang menyoroti kekhawatiran akan kembalinya praktik-praktik otoriter di Indonesia.

Berbagai gerakan masyarakat, baik secara langsung melalui demonstrasi maupun tidak langsung melalui media sosial, dalam rangka memprotes revisi UU TNI merupakan pengamalan nilai musyawarah menuju mufakat yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa. Masyarakat merasa kurang dilibatkan oleh kekuasaan legislatif Negara Indonesia dalam proses jejak pendapat maupun perumusan revisi undang-undang tersebut. Terdapat sejumlah kaum muda yang tergolong ke dalam Generasi Z, baik mahasiswa maupun pekerja, yang tergerak dan terlibat di dalam berbagai gerakan menyampaikan aspirasi terkait isu ini. Namun tak sedikit pula kaum muda yang kurang berpartisipasi dalam

menanggapi isu tersebut. Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta penghayatan terhadap Pancasila bagi kaum muda di Indonesia masih diperlukan.

## Pembahasan

### Sejarah Kelahiran Pancasila dan Peran Kaum Muda dalam Peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945

Menurut Kanumoyoso (2021), salah satu peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai kelahiran Pancasila adalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pertama yang diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 (Manurung & Kanumoyoso, 2021, hlm. 39). BPUPK atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai “Dokurisu Zyunbi Tyoosakai” merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang, yang selama 3 tahun yaitu 1942 hingga 1945, untuk memenuhi janjinya yaitu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang sebenarnya menjanjikan pembentukan badan ini sejak 1 Maret 1945, tetapi baru direalisasikan pada 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Tenno Heika. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia karena sejak awal 1944, posisi Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak oleh pihak Sekutu, terutama Amerika Serikat. BPUPK diketuai oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat dan terdiri dari 69 orang anggota. Sukarno sendiri menjadi anggota sesuai dengan keinginannya untuk dapat menyampaikan pokok gagasannya tentang dasar negara.

Dalam sidang tersebut, pada 29 Mei 1945 Dr. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPK mengajukan pertanyaan, “Apakah yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka?” Pertanyaan tersebut kemudian direspons dengan berbagai pemikiran yang disampaikan oleh anggota sidang dengan berbagai penekanan yang berbeda-beda, namun tidak ada satu pun pandangan yang dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Di antara para anggota sidang, terdapat tiga tokoh yang dapat memberikan jawaban secara utuh terhadap pertanyaan tersebut. Ketiga tokoh tersebut ialah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Sukarno. Muhammad Yamin, seorang tokoh nasionalis, sastrawan, dan ahli hukum, pada pidatonya tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan prinsip-prinsip dasar negara yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ke-Tuhanan, permusyawaratan, dan kesejahteraan rakyat (Margiyanti, 2023). Soepomo, ahli hukum terkemuka dan guru besar hukum adat di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, pada 31 Mei 1945 menyampaikan gagasan tentang negara integralistik tetapi tidak mengulas secara eksplisit prinsip-prinsip dasar negara yang seharusnya menjadi pokok bahasan. Akan tetapi, terdapat lima poin utama yang secara implisit dikemukakannya sebagai dasar negara Indonesia yaitu persatuan (unitarisme), kekeluargaan, keseimbangan lahir-batin, musyawarah, dan keadilan rakyat (Yasin, 2023). Kedua tokoh tersebut memang membahas dasar negara, tetapi bukan dalam pengertian sebagai *philosophische grondslag* atau dasar filosofis, sebagaimana dikehendaki oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPK.

Satu-satunya tokoh yang menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif, utuh, dan lengkap ialah Sukarno. Sukarno, yang pada kala itu berusia 43 tahun, berpidato tanpa teks pada 1 Juni 1945 pukul 09.00 – 10.00 WIB (Manurung & Kanumoyoso, 2021, hlm. 48). Dalam awal pidatonya, Sukarno menjelaskan bahwa yang dikehendaki oleh ketua sidang ialah *philosophische grondslag* (dasar filosofi) dan *weltanschauung* (pandangan hidup) dari negara Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya. Sukarno mengemukakan prinsip pertama dari dasar negara yang diusulkannya, yaitu kebangsaan. Bagi Sukarno, kebangsaan atau nasionalisme berarti bangsa Indonesia memiliki kehendak untuk bersatu, sebagaimana pemikiran Ernest Renan. Akan tetapi, Sukarno juga mengingatkan segenap peserta sidang untuk menghindari konsep kebangsaan chauvinisme, “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri bukan chauvinisme, sebagaimana dikobar-kobarkan orang di Eropa, ...” (Aning, 2019, hlm. 134). Prinsip ke dua dari dasar negara yang diusulkan Sukarno yaitu internasionalisme. Menurut Sukarno, internasionalisme yang dia maksud berbeda dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme merupakan suatu konsep yang meyakini bahwa kewarganegaran seseorang bukanlah suatu hal yang penting dengan dalih bahwa orang tersebut telah menjadi warga dunia. Tetapi Sukarno berpikir bahwa baik nasionalisme dan internasionalisme perlu dihayati secara seimbang, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hdiup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini ... adalah bergandengan erat satu lain sama lain” (Aning, 2019, hlm. 135). Internasionalisme juga berarti penghargaan terhadap kemanusiaan dan kedudukan yang sama dari setiap bangsa di dunia. Prinsip ketiga yang dikemukakan Sukarno yaitu mufakat, permusyawaratan, dan perwakilan, atau yang lebih dikenal

dengan istilah “demokrasi”. Mengenai prinsip ini, Sukarno mengusulkan untuk mendirikan Badan Perwakilan Rakyat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup berbangsa dan bernegara dengan cara bermusyawarah, “Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal ... yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat” (Aning, 2019, hlm. 136). Pada prinsip yang keempat, Sukarno mengemukakan kesejahteraan, yaitu “prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka” (Aning, 2019, hlm. 138). Negara Indonesia yang dimaksud Sukarno bukanlah negara yang menumpuk “kapital”, modal atau kekayaan, melainkan negara yang mampu menyejahterakan rakyat. Prinsip yang kelima yaitu ketuhanan, atau lebih tepatnya “Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’, yaitu dengan cara ‘hormat-menghormati satu sama lain’” (Aning, 2019, hlm. 142). Gagasan tersebut dinamai Sukarno sebagai ‘Pancasila’, yang artinya lima dasar. Dia juga menyatakan bahwa kelima dasar tersebut dapat diringkas menjadi ‘Trisila’, tiga dasar, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan, dan dapat pula diringkas menjadi ‘Ekasila’, yaitu gotong royong.

Pidato Sukarno tersebut diterima secara aklamasi oleh sidang BPUPK (Manurung & Kanumoyoso, 2021, hlm. 55). Sidang tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang dengan Sukarno sebagai ketuanya. Tugas Panitia Kecil ialah merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Sukarno serta menyusun rumusan tersebut menjadi teks untuk Proklamasi Kemerdekaan. Akan tetapi, sebelum Panitia Kecil tersebut bertugas, Sukarno selaku ketuanya berinisiatif untuk mengumpulkan 38 anggota *Chuo Sangi In* (Dewan Pertimbangan Pusat) yang bersidang pada 18 – 21 Juni 1945 dalam suatu pertemuan ekstra kelembagaan. Dalam pertemuan tersebut Sukarno membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang kelak disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan kemudian menyusun rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang memuat rumusan Pancasila. Selanjutnya, pada 12 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai tindak lanjut dari apa yang dihasilkan oleh BPUPK. Pada 18 Agustus 1945, PPKI yang berjumlah 27 anggota, bersidang untuk pertama kalinya dan menghasilkan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang masih berlaku hingga saat ini.

Tetapi, sebelum itu terjadi, terdapat satu peristiwa di Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945, satu hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan (Parinduri, 2022). Peristiwa tersebut sebenarnya bermula pada 14 Agustus 1945 ketika Soetan Sjahrir mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya dari radio. Sjahrir segera menemui Sukarno dan Hatta, yang baru saja pulang dari Dalat Vietnam, untuk menyampaikan kabar tersebut dan mencoba meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, Sukarno dan Hatta pergi ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Oleh sebab itu Sukarno dan Hatta lebih memilih menunggu kepastian sembari menanti pemenuhan janji tersebut, ketimbang terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sukarno dan Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI pada 16 Agustus 1945. Mendengar keputusan Sukarno dan Hatta tersebut, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur pada 15 Agustus 1945 malam dipimpin oleh Chaerul Saleh. Mereka menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan, oleh sebab itu Sukarno dan Hatta harus diamankan ke luar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Tepat pukul 04.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta dibawa oleh sejumlah pemuda, di antaranya Soekarni, Wikana, dan Chaerul Saleh, ke Rengasdengklok dan ditempatkan di rumah Jiaw Ki Song, seorang warga keturunan Tionghoa. Tindakan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menekan Sukarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena para pemuda segan terhadap Sukarno dan Hatta. Akhirnya, setelah perundingan antara golongan tua yang diwakili Sukarno, Hatta, serta Mr. Achmad Soebardjo dengan golongan muda, mereka menyepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut memberikan banyak pelajaran tentang perubahan perilaku, ketika pada saat itu terdapat perbedaan pandangan mengenai cara memperoleh kemerdekaan (Wiratama dkk., 2023, hlm. 394). Golongan muda menginginkan agar bangsa Indonesia segera merdeka dengan memproklamasikan kemerdekaan sendiri, sementara golongan tua tetap setia pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Akhirnya, setelah mediasi oleh Mr. Achmad

---

Soeardjo, disepakati untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan mempertimbangkan fakta menyerahnya Jepang dalam perang Asia-Pasifik.

### Generasi Z sebagai Kaum Muda Indonesia Dewasa Ini

Generasi Z, atau Gen Z, merupakan istilah yang merujuk pada individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga pertengahan 2010-an. Di Indonesia, Gen Z merupakan kelompok demografis yang signifikan dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari generasi sebelumnya, seperti Generasi Y (Millennials). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik pada 2020 menjelaskan bahwa Gen Z mendominasi jumlah pemilih pemula dengan persentase 27,94 % dari total seluruh penduduk Indonesia, atau sekitar 70 juta orang (Robin dkk., 2022, hlm. 184). Untuk dapat mempengaruhi Gen Z agar memiliki pemahaman yang tepat dan penghayatan yang mendalam terhadap Pancasila diperlukan telaah terhadap karakteristik Gen Z di Indonesia. Secara umum, karakteristik Gen Z di Indonesia tampak dalam beberapa aspek, di antaranya Digital-Native dan perilaku konsumen, nilai dan sikap sosial, pendidikan dan karir, investasi dan keuangan, serta gaya hidup dan preferensi produk. Pertama, Gen Z di Indonesia dikenal sebagai digital-native yang sangat terampil dalam menggunakan teknologi (Hadi Raharjo, 2023, hlm. 181). Mereka cenderung lebih memilih platform digital untuk berbagai aktivitas, termasuk pembayaran digital dan media sosial. Dalam konteks konsumen, mereka menunjukkan preferensi terhadap merek lokal dan lebih mengandalkan agen perjalanan online untuk informasi dan pemesanan hotel. Kedua, Gen Z di Indonesia memiliki nilai-nilai yang dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural dan peristiwa signifikan di negara tersebut. Mereka realistis namun percaya diri, dan meskipun sangat mandiri, mereka tetap menghargai interaksi sosial, terutama dengan orang yang lebih berpengalaman. Selain itu, mereka menunjukkan minat yang tinggi terhadap politik, meskipun merasa kurang informasi dan menginginkan pendidikan politik yang lebih baik (Robin dkk., 2022, hlm. 184). Ketiga, dalam hal pendidikan dan karir, Gen Z di Indonesia menekankan pentingnya keamanan kerja dan penghasilan yang baik. Mereka bersedia bekerja lebih keras dan berpindah tempat untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Gen Z juga menunjukkan minat terhadap teknologi kantor yang cerdas dan tanggung jawab sosial perusahaan (Gustine, 2024, hlm. 237). Keempat, Gen Z di Indonesia menunjukkan minat terhadap investasi berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Namun, tingkat literasi keuangan yang bervariasi mempengaruhi pemahaman mereka tentang produk investasi. Toleransi risiko mereka dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan sosial (Judijanto dkk., 2024, hlm. 793). Kelima, dalam hal gaya hidup, Gen Z di Indonesia cenderung memilih produk fashion lokal dan menunjukkan preferensi yang berbeda dalam memilih produk seperti tas berdasarkan daya tarik emosional, desain, dan fungsionalitas (Andansari dkk., 2024, hlm. 179). Mereka juga mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian tujuan dan kebahagiaan orang-orang terdekat, terutama keluarga. Secara keseluruhan, Gen Z di Indonesia adalah kelompok yang dinamis dengan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh teknologi, nilai-nilai sosial, dan kondisi ekonomi. Karakteristik tersebut berpengaruh terhadap bagaimana mereka menghayati Pancasila pada masa kini. Mereka cenderung terbuka dan kritis terhadap berbagai upaya penanaman nilai-nilai, termasuk Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.

Kaum muda di Indonesia, khususnya Generasi Z, menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam menghayati Pancasila sebagai landasan filosofis dan spiritual dalam hidup berbangsa dan bernegara. Waspiyah, dkk. mengkategorisasikan tantangan tersebut ke dalam aspek budaya (cultural), pendidikan (educational), dan perilaku (behavioral) (Waspiyah dkk., 2022, hlm. 2). Dalam ranah kebudayaan, penghayatan Pancasila menghadapi tantangan dari kebudayaan yang berasal dari luar Indonesia. Tantangan yang bersifat kultural terdiri dari westernisasi, globalisasi, dan penolakan terhadap nilai-nilai tradisional. Westernisasi ditunjukkan dengan banyaknya kaum muda Indonesia yang terpengaruh oleh budaya barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menyebabkan mereka terpisah dari akar kebudayaannya. Derasnya arus informasi dan pengaruh dari ideologi asing karena globalisasi menimbulkan tantangan dalam memelihara relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dewasa ini terdapat suatu "trend" di antara kaum muda untuk meninjau kembali nilai-nilai tradisional budaya Nusantara, sehingga memudahkan peran Pancasila dalam pembentukan identitas kaum muda. Pendidikan sejatinya merupakan sarana utama bagi pembentukan kepribadian pemuda Indonesia. Tantangan di dunia pendidikan tampak dalam berkurangnya minat akan pendidikan Pancasila, metode pengajaran yang tidak efektif, serta kurangnya dukungan di rumah. Meskipun Pancasila menjadi

pelajaran wajib dalam sistem pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, banyak siswa kurang memiliki minat terhadap pelajaran tersebut dan melihatnya menjadi sekadar kewajiban. Pedagogi yang digunakan untuk mengajar Pancasila sudah ketinggalan zaman, ketika guru atau dosen hanya berceramah dan siswa mencatat dan menghafal, yang mengakibatkan miskinnya pemahaman dan kurangnya implementasi terhadap apa yang mereka pelajari. Selain itu, orangtua serta komunitas di rumah juga kurang memberikan dukungan yang dapat membangkitkan rasa keingintahuan siswa. Di samping itu semua, perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, seperti media sosial, turut membentuk perilaku pemuda Indonesia dewasa ini. Tantangan perilaku di antaranya pola berpikir yang pendek (*short-term thinking*) dan kurangnya koersi sosial. Banyak kaum muda yang kurang menyadari konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, yang nantinya akan berdampak pada pengamalan prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila. Selain itu, semangat persaudaraan dan sikap saling menghormati juga semakin berkurang, yang tentu bertentangan dengan nilai persatuan yang termuat di dalam Pancasila.

### Peran Pancasila dalam Menginspirasi Kaum Muda

Berkaca pada pengalaman Gen Z terlibat dalam demonstrasi terhadap revisi UU TNI, mereka perlu belajar pada pengalaman kaum muda di era kemerdekaan, khususnya dalam peristiwa Rengasdengklok. Di satu sisi, kaum muda pada masa itu memiliki dorongan yang kuat untuk mengupayakan kemerdekaan Republik Indonesia secepat mungkin, karena mampu melihat momentum yang tepat. Namun di sisi lain, mereka juga perlu belajar dari golongan tua yang tetap mau mempertimbangkan asas musyawarah-mufakat sehingga tidak terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan. Pada masa kini, revisi UU TNI banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai upaya yang terburu-buru dan kurang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Maka, peran kaum muda, khususnya Gen Z, dalam mengangkat isu ini penting agar menjadi perhatian para pejabat, khususnya perwakilan yang mereka pilih saat momen Pemilihan Umum dan saat ini duduk di kursi legislatif. Partisipasi aktif Gen Z, baik secara langsung turun ke lapangan demonstrasi maupun secara tidak langsung melalui media sosial, diperlukan untuk membuka ruang dialog yang mampu mengakomodir aspirasi berbagai kalangan di Indonesia demi tercapainya kebijakan yang lebih baik melalui proses musyawarah-mufakat. Selain itu, diperlukan suatu proses internalisasi semangat para tokoh kebangsaan sehingga menjadi bagian dari karakteristik Gen Z di Indonesia.

Adapun peningkatan peran Pancasila dalam menginspirasi kaum muda, khususnya generasi Z, sehingga semakin mampu menghayati semangat kemerdekaan para tokoh nasional pada masa kini adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme (Idayanti & Taufik, 2023, hlm. 76). Pancasila berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu kaum muda untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan menjaga budaya lokal di tengah arus globalisasi. Kedua, menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi (Syafitri Aulia & Anggraeni Dewi, 2022, hlm. 1100). Generasi muda saat ini dihadapkan pada tantangan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai nasionalisme. Pancasila dapat menjadi alat untuk menyaring pengaruh negatif dari budaya asing dan menjaga identitas nasional. Ketiga, pendidikan nilai Pancasila (Maola & Dewi, 2021, hlm. 257). Implementasi pendidikan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi dapat membantu membentuk karakter generasi muda yang beretika dan bermoral, serta mencintai tanah air. Keempat, membangun karakter inklusif (Fios dkk., 2021, hlm. 331). Pancasila dapat digunakan sebagai paradigma untuk membangun karakter inklusif di kalangan generasi muda, yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.

### Simpulan

Pancasila, yang dirumuskan pada 1 Juni 1945 oleh Ir. Sukarno, merupakan dasar negara, ideologi, dan spiritualitas bangsa Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai fundamental bangsa. Meskipun telah menjadi dasar negara, implementasi Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran nilai-nilai dan kurangnya partisipasi publik dalam proses perumusan undang-undang, dalam hal ini revisi UU TNI.

Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 terjadi setelah Soetan Sjahrir mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu, dan golongan muda membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk mendesak proklamasi kemerdekaan. Setelah mediasi oleh Mr. Achmad Soebardjo, disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, dengan mempertimbangkan fakta menyerahnya Jepang dalam perang Asia-Pasifik.

Berkaca pada peristiwa perumusan Pancasila dan Peristiwa Rengasdengklok, serta melihat partisipasi kaum muda dalam jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semakin disadari bahwa Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran krusial dalam menginspirasi kaum muda untuk menghayati kemerdekaan dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Melalui pendidikan dan implementasi nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat dibekali dengan karakter yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga identitas nasional.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung penulis dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengerjaan jurnal ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) yang memotivasi penulis untuk membuat tulisan ini.

### Daftar Pustaka

- Ameliy, P., Rahma Agustina, R., Utami, R. T., Azizah, R., Widodo, A., Mailani, R. G., Amalia, S. N., Mahdiyyah, S. H., Kamiliya, S., Selvianika, S., Fitriyanngsih, S., Prio, A. & Santoso, A. (2023). The Decline of the Function of Pancasila as the Moral of the Nation and the Basis of the State. *The Easta Law and Human Rights*, 01(02), 73–77. <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/eslhr>
- Andansari, D., Shyafary, D. & Bhakti, S. O. W. (2024). Gen Z's Passion for Apparel Products in East Kalimantan, Indonesia. *Buletin Poltanesa*, 25(2), 176–180. <https://doi.org/10.51967/tanesa.v25i2.3165>
- Aning, F. (Ed.). (2019). *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Penerbit Media Pressindo.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (t.t.). *Profil Lembaga*. <https://bpip.go.id/tentang-bpip>. Diambil 16 April 2025, dari <https://bpip.go.id/tentang-bpip>
- Burhanudin, J., Latif, Y. & Hongxuan, L. (2018). *The Religiosity, Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's Way*. 25(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.15408/sdi.v25i2.7502>
- Chaterine, R. N. & Ramadhan, A. (2025, 20. Maret). *RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya>. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya>
- Demo tolak pengesahan revisi UU TNI diwarnai teror, kekerasan, dan intimidasi terhadap aktivis, mahasiswa dan jurnalis*. (2025, 21. Maret). <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/demo-tolak-pengesahan-revisi-uu-tni-diwarnai-teror-kekerasan-dan-intimidasi-terhadap-aktivis-mahasiswa-dan-jurnalis/03/2025/>. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/demo-tolak-pengesahan-revisi-uu-tni-diwarnai-teror-kekerasan-dan-intimidasi-terhadap-aktivis-mahasiswa-dan-jurnalis/03/2025/>
- Fios, F., Witono, P. H., Tirtawinata, C. M. & Prasojo, A. (2021). Pancasila as a Paradigm in Building Inclusive Character of the Young Generation of the Nation: Case Study on BINUS University Students of Alam Sutera Campus. *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences, Laws, Arts and Humanities*, 327–331. <https://doi.org/10.5220/0010007400002917>
- Gerakan Pembumian Pancasila Merupakan Spirit dan Moral Kebangsaan Kita*. (2019, 11. Agustus). <https://eksposenews.com/2019/08/11/gerakan-pembumian-pancasila-merupakan-spirit-dan-moral-kebangsaan-kita/>. <https://eksposenews.com/2019/08/11/gerakan-pembumian-pancasila-merupakan-spirit-dan-moral-kebangsaan-kita/>

- Gustine, G. G. (2024). Generation Z's Attitudes and Expectations in the Workplace and Their Implications for Education Policy in Indonesia. *Muslim Education Review*, 3(2), 235–261. <https://journal.uiii.ac.id/index.php/mer/article/view/262/254>
- Hadi Raharjo, R. J. (2023). The Gen Z's Digital Payment Loyalty in Indonesia. *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 83, 181–202. <https://doi.org/10.33788/rcis.83.13>
- Idayanti, S. & Taufik, M. (2023). Fostering Awareness of Nationalism Through Pancasila Among High School Students. *ASEAN Journal of Empowering Community*, 1(2), 68–80. <https://doi.org/10.24905/ajecom/vol1issue2.5>
- Judijanto, L., Utami, E. Y. & Siagian, A. O. (2024). Gen Z Investor Behavior: Analyzing the Influence of Sustainable Investment Practices, Financial Education, and Risk Tolerance in Indonesia. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 6(3), 792–803. <https://doi.org/10.31539/jomb.v6i3.8832>
- Manurung, A. D. R. & Kanumoyoso, B. (2021). *Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi, dan Spiritualitas Bangsa* (T. Diman & S. Purnama, Ed.). Penerbit Media Maxima.
- Maola, P. S. & Dewi, D. A. (2021). MEMBANGKITKAN SIKAP NASIONALISME BAGI GENERASI MUDA MELALUI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN NILAI-NILAI PANCASILA. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 4(3), 254–258. <http://journal.unpak.ac.id/index.php/jppguseda>
- Margiyanti, R. (2023, 31. Oktober). *Rumusan Pancasila menurut Mohammad Yamin dalam Sidang BPUPKI*. <https://tirto.id/rumusan-pancasila-menurut-mohammad-yamin-dalam-sidang-bpupki-1945-guCf>. <https://tirto.id/rumusan-pancasila-menurut-mohammad-yamin-dalam-sidang-bpupki-1945-guCf>
- Parinduri, A. (2022, 15. Agustus). *Peristiwa Rengasdengklok: Sejarah, Latar Belakang, & Kronologi*. <https://tirto.id/peristiwa-rengasdengklok-sejarah-latar-belakang-kronologi-f9kW>. <https://tirto.id/peristiwa-rengasdengklok-sejarah-latar-belakang-kronologi-f9kW>
- Robin, P., Alvin, S. & Hasugian, T. (2022). Gen-Z Perspective on Politics: High Interest, Uninformed, and Urging Political Education. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(3), 183–189. [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Syafitri Aulia, ra & Anggraeni Dewi, D. (2022). Peran Pancasila dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme dan Patriotisme Generasi Muda di Era Globalisasi. *Journal on Education*, 04(04), 1097–1102.
- Waspiah, W., Arifin, R., Putri, N. M., Safarin, M. H. A. F. & Putri, D. D. P. (2022). Young People and Pancasila: The Current Challenges. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 133–154. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>
- Wiratama, M. R., Irvan, M., Ramadhan, F., Bestari, P. & Iswandi, D. (2023). *UTILIZATION OF RENGASDENGKLOK HISTORICAL SITE AS A SOURCE OF LEARNING PANCASILA AND CIVIC EDUCATION IN IMPROVING MORALE NATIONALISM*. 2(2). <http://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr>
- Yasin, A. (2023, 31. Oktober). *Isi Rumusan Pancasila menurut Mr. Soepomo di Sidang BPUPKI*. <https://tirto.id/isi-rumusan-pancasila-menurut-mr-soepomo-dalam-sidang-bpupki-1945-gtZY>. <https://tirto.id/isi-rumusan-pancasila-menurut-mr-soepomo-dalam-sidang-bpupki-1945-gtZY>